

Ujian Akhir Nasional Tahun 2001 Tata Negara

UNAS-SMA-01-01

Makna yang terkandung dari sifat memaksa yang dimiliki negara dimaksudkan agar ...

- A. menguasai semua kehidupan dalam negara
- B. peraturan perundangan yang berlaku harus ditaati
- C. membolehkan suatu kegiatan di dalam masyarakat.
- D. memaksakan kepentingan penguasa kepada masyarakat
- E. tujuan bersama demi kepentingan bersama tercapai

UNAS-SMA-01-02

Mengenai tujuan negara, *Prof. Mr. R. Kranenburg* berpendapat bahwa negara *tidak sekedar memelihara ketertiban hukum belaka, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warganya*. Teori ini lebih dikenal dengan nama ...

- A. *welfare state*
- B. *security state*
- C. *state of property*
- D. *nachteachersiaat*
- E. *freedom of rights*

UNAS-SMA-01-03

Perbedaan pokok antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia terletak pada ...

- A. pekerjaan tetapnya
- B. lamanya berdomisili
- C. tempat kelahirannya
- D. strata sosialnya
- E. hak dan kewajibannya

UNAS-SMA-01-04

Res Nullius merupakan konsepsi tentang wilayah kelautan yang menyatakan bahwa laut itu ...

- A. milik masyarakat dunia yang dapat dimiliki
- B. milik masyarakat dunia yang tidak dapat dimiliki
- C. dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara
- D. boleh dimiliki oleh setiap negara secara bebas
- E. boleh diatur kepemilikannya oleh masyarakat dunia

UNAS-SMA-01-05

Contoh wilayah ekstrateritorial dari negara Indonesia adalah ...

- A. gedung dan halaman KBRI di Malaysia
- B. gedung kedutaan Amerika Serikat di Jakarta
- C. kantor apartemen luar negeri RI di Jakarta
- D. kapal Singapura yang berlayar di Selat Sunda
- E. kantor perwakilan PBB di Jakarta

UNAS-SMA-01-06

Perhatikan data berikut ini!

1. Bersifat umum dan abstrak, objeknya negara dalam arti menyeluruh
2. Bersifat spesifik, objeknya negara tertentu
3. Dibatasi ruang dan waktu
4. Tidak dibatasi pada ruang dan waktu
5. Kajiannya cenderung lebih bersifat teoretis
6. Kajiannya cenderung lebih luas dan tentang kenegaraan tertentu
7. Ruang lingkupnya terbatas pada hal-hal bersifat pokok dan mendasar
8. Ruang lingkup kajiannya lebih luas, terutama meliputi teknis penyelenggaraan negara

Dari data di atas, yang dipelajari dalam ilmu negara adalah ...

- A. 1, 3, 6, dan 7
- B. 1, 4, 5, dan 7
- C. 1, 4, 5, dan 8
- D. 2, 4, 5, dan 8
- E. 3, 4, 5, dan 7

UNAS-SMA-01-07

Pengertian negara menurut *Prof. Mr. R. Kranenburg* adalah organisasi yang ...

- A. dengan kekuasaannya bertujuan untuk mengatur masyarakat tertentu
- B. timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan individu dan universal
- C. timbul karena kehendak suatu golongan atau bangsanya sendiri
- D. integral antara semua golongan dari seluruh anggota masyarakat
- E. disusun berdasarkan perjanjian antara individu dengan penguasa

UNAS-SMA-01-08

Berdasarkan fakta sejarah, suatu negara dapat terjadi karena fusi, yaitu ...

- A. suatu wilayah yang tidak bertuan diduduki dan dikuasai oleh suatu kelompok
- B. suatu wilayah negara melepaskan diri dari negara yang semula menguasainya
- C. suatu wilayah negara dari suatu bangsa dikuasai atau dicaplok oleh bangsa lain
- D. meleburnya beberapa negara yang mendiami suatu wilayah menjadi negara baru
- E. suatu wilayah negara diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu

UNAS-SMA-01-09

Proses penyerahan wilayah *Sleeswijk* pada Perang Dunia I dari Austria kepada Prusia (Jerman) berdasarkan fakta sejarah berdirinya negara dinamakan ...

- A. *occupatie*
- B. *cessie*
- C. *accessie*
- D. *anexatie*
- E. *inovation*

UNAS-SMA-01-10

Perhatikan data berikut!

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Wakil Presiden
3. Presiden
4. Dewan Pertimbangan Agung
5. Menteri Kabinet

Berdasarkan data di atas, yang termasuk pemerintahan dalam arti sempit yaitu nomor ...

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 4, dan 5
- C. 2, 3, dan 4
- D. 2, 3, dan 5
- E. 3, 4, dan 5.

UNAS-SMA-01-11

Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, maka kedaulatan bersifat ...

- A. permanen
- B. tunggal
- C. absolut
- D. bulat
- E. asli

UNAS-SMA-01-12

Pengertian bentuk kenegaraan koloni adalah ...

- A. bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris
- B. suatu negara yang berada di bawah lindungan negara kuat
- C. wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah PD I
- D. wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah PD II
- E. suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain

UNAS-SMA-01-13

Perbedaan bentuk pemerintahan monarki dengan republik terletak pada ...

- A. susunan lembaga negaranya
- B. struktur organisasi pemerintahannya
- C. fungsi dan tugas kepala negaranya
- D. cara menunjuk kepala negaranya
- E. kedudukan lembaga-lembaga negaranya

UNAS-SMA-01-14

Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi disebut demokrasi ...

- A. material
- B. formal
- C. gabungan
- D. referendum
- E. pemisahan kekuasaan

UNAS-SMA-01-15

Pernyataan dalam tabel berikut ini yang menunjukkan perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial adalah

No.	Parlementer	No.	Presidensial
A.	Masa jabatan ditentukan dengan pasti	A.	Masa jabatan tidak ditentukan dengan pasti
B.	Presiden lebih kuat daripada parlemen	B.	Parlemen lebih kuat dari pada presiden
C.	Parlemen tidak dapat membubarkan presiden	C.	Presiden dapat membubarkan parlemen
D.	Menerapkan sistem pemisahan kekuasaan	D.	Menerapkan sistem pembagian kekuasaan
E.	Menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen	E.	Menteri-menteri bertanggungjawab kepada presiden

UNAS-SMA-01-16

Penggunaan hak pilih dijamin keamanannya sesuai hati nuraninya. Hak itu berdasarkan asas pemilu ...

- A. langsung
- B. umum
- C. rahasia
- D. bebas
- E. netral

UNAS-SMA-01-17

Dalam pelaksanaan kekuasaan negara pada umumnya menganut asas pembagian kekuasaan maupun pemisahan kekuasaan, supaya ...

- A. kekuasaan pemerintahan tidak terpusat pada satu tangan
- B. penierintah dapat bebas dalam menjalankan kekuasaan negara
- C. lembaga negara dapat leluasa dalam kerjasama
- D. presiden dengan mudah membagi tugas kepada pembantunya
- E. keamanan negara dapat terjamin dengan baik

UNAS-SMA-01-18

Salah satu tipe negara hukum *Anglo Saxon* mengutamakan hak asasi manusia yang tidak bersumber pada konstitusi, karena hak asasi manusia ...

- A. bersumber pada peraturan perundang-undangan
- B. sudah ada sejak manusia dilahirkan
- C. diberikan oleh komisi hak asasi manusia PBB
- D. dimiliki oleh setiap manusia setelah dewasa
- E. diberikan oleh pemimpin negara yang berdaulat

UNAS-SMA-01-19

Perhatikan data-data berikut ini!

1. Kebebasan berpendapat
2. Memilih pendidikan
3. Mendirikan partai
4. Memeluk agama
5. Mengembangkan kebudayaan

Berdasarkan data di atas nomor-nomor yang termasuk bagian dari hak asasi pribadi terdapat pada nomor ...

- A. 1 dan 3
- B. 1 dan 4
- C. 2 dan 4
- D. 2 dan 5
- E. 3 dan 5

UNAS-SMA-01-20

"Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat."

Pendapat ini dikemukakan oleh ...

- A. Franklin D. Roosevelt
- B. Mrs. Eleanor Roosevelt
- C. Hans Kelsen
- D. John Locke
- E. Montesquieu

UNAS-SMA-01-21

Perhatikan macam-macam hak asasi manusia berikut ini!

1. Kebebasan menyatakan pendapat
2. Hak memiliki sesuatu
3. Memilih pendidikan
4. Ikut serta dalam pemerintahan
5. Membeli atau menjual sesuatu
6. Perlindungan dari rasa takut

Dari macam-macam HAM tersebut di atas, yang termasuk hak asasi bidang ekonomi adalah ...

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 5
- C. 2 dan 5
- D. 3 dan 6
- E. 4 dan 6

UNAS-SMA-01-22

Hak asasi manusia di Indonesia antara lain diatur oleh UUD 1945 dalam pasal-pasal sebagai berikut, *kecuali* ...

- A. pasal 27 (1) dan (2)
- B. pasal 28
- C. pasal 29 (2)
- D. pasal 30 (1) dan 31 (1)
- E. pasal 35, 36, dan 37

UNAS-SMA-01-23

"Politik adalah pengambilan keputusan kolektif untuk masyarakat seluruhnya."

Pendapat ini dikemukakan oleh ...

- A. Sigmund Neuman
- B. Mac Iver
- C. Miriam Budiardjo
- D. Joyce Mitchell
- E. Harold Laswell

UNAS-SMA-01-24

Pengertian manusia sebagai insan politik adalah ...

- A. secara kodrati sebagai makhluk monodualis
- B. pelaksana aktivitas-aktivitas politik kenegaraan
- C. makhluk pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa
- D. makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain
- E. makhluk yang dijadikan khalifah di bumi

UNAS-SMA-01-25

Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik, yang berarti ...

- A. mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik
- B. mengajak orang yang aktif dan potensial untuk menjadi juru kampanye suatu partai
- C. memberikan penanaman nilai, mengajak orang-orang untuk aktif di parpol tertentu
- D. mencari anggota sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pemilu parpol tertentu
- E. mengajak orang-orang tertentu agar mau bergabung dalam suatu parpol tertentu

UNAS-SMA-01-26

Setiap manusia berhak mendapatkan *rights of legal equality*, yaitu ...

- A. hak mengeluarkan pendapat
- B. menggunakan hak pilih dalam pemilu
- C. memilih agama menurut keyakinannya
- D. mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- E. mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupannya

UNAS-SMA-01-27

Berikut ini negara yang menganut sistem dua partai adalah ...

- A. Indonesia pasca orde baru
- B. Amerika Serikat
- C. Malaysia
- D. Perancis
- E. Cina (RRC)

UNAS-SMA-01-28

Kebaikan sistem partai tunggal adalah ...

- A. berkurangnya kritik yang tidak membangun
- B. hidup dalam pemerintah otoriter
- C. dapat menyusun pemerintahan secara cepat
- D. pelaksanaan demokrasi lebih lancar
- E. tidak perlu melaksanakan pemilihan umum

UNAS-SMA-01-29

Di antara pernyataan berikut ini yang merupakan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah ...

- A. penetapan Presiden dan Wakil Presiden
- B. mengesahkan Pembukaan UUD 1945
- C. mengesahkan UUD 1945
- D. Penetapan KNIP sebagai badan pembantu presiden
- E. Penetapan politik luar negeri bebas aktif

UNAS-SMA-01-30

Kedudukan dan peranan utama Pancasila menurut Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 adalah ...

- A. mempersatu bangsa
- B. sumber hukum
- C. pandangan hidup
- D. cita-cita bangsa
- E. dasar negara

UNAS-SMA-01-31

Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila merupakan ...

- A. dasar negara mengatur pemerintahan negara
- B. pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia
- C. gambaran sikap dan perilaku manusia Indonesia
- D. perjanjian luhur bangsa Indonesia
- E. cita-cita dan tujuan hidup bangsa

UNAS-SMA-01-32

Salah satu makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 adalah ...

- A. pernyataan subyektif bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan
- B. pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
- C. kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan
- D. motivasi spiritual bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Tuhan
- E. kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan dalam mencapai tujuannya

UNAS-SMA-01-33

Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945 tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945, pada ...

- A. pasal 1 ayat (1)
- B. pasal 1 ayat (2)
- C. pasal 2 ayat (1)
- D. pasal 2 ayat (2)
- E. pasal 2 ayat (3)

UNAS-SMA-01-34

Berikut ini yang *bukan* merupakan tugas MPR adalah ...

- A. menetapkan Undang-Undang Dasar
- B. menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara
- C. memilih Presiden
- D. memilih Wakil Presiden
- E. meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris

UNAS-SMA-01-35

Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan pasal 1 ayat 2 adalah ...

- A. pelaksana negara tertinggi
- B. pelaksanaan pemerintahan negara tertinggi
- C. penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat
- D. pembuat kebijaksanaan tertinggi dalam negara
- E. pemegang kedaulatan negara

UNAS-SMA-01-36

Menurut UUD 1945 DPR mengawasi pelaksanaan tugas Presiden, selaku kepala pemerintahan negara, yaitu dengan cara ...

- A. presiden membentuk UU dengan persetujuan DPR
- B. dengar pendapat dan rapat koordinasi
- C. presiden bertanggungjawab kepada DPR
- D. presiden tidak bergantung pada DPR
- E. presiden bersama-sama DPR menetapkan GBHN

UNAS-SMA-01-37

Perbedaan antara wakil presiden dengan menteri sebagai pembantu presiden terletak pada ...

- A. cara pertanggungjawabannya
- B. masa jabatannya
- C. cara kerja samanya
- D. pengangkatannya
- E. keanggotaannya

UNAS-SMA-01-38

Salah satu lembaga non departemen yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 1961 dengan tugas pokok mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara di pengadilan disebut ...

- A. BAPPENAS
- B. Komnas HAM
- C. Kejaksaan Agung
- D. BAKIN
- E. Komisi Ombudsman

UNAS-SMA-01-39

Asas yang merupakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah di tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah di tingkat yang lebih rendah dan menjadi urusan rumah tangganya sendiri disebut ...

- A. asas dekonsentrasi
- B. asas sentralisasi
- C. asas desentralisasi
- D. asas perbantuan
- E. asas pertimbangan daerah

UNAS-SMA-01-40

Contoh perbuatan warga negara yang dapat dikategorikan melanggar hukum publik adalah ...

- A. meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi
- B. mendirikan perusahaan tanpa memiliki modal
- C. membujuk seseorang supaya menjual tanahnya dengan harga murah
- D. menikahi seseorang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan
- E. menyiksa fisik seseorang yang tidak mau membayar hutang

UNAS-SMA-01-41

Hukum perdata menurut penggolongan hukum terdiri dari hukum ...

- A. perorangan, benda, kekeluargaan, dan hukum waris
- B. perorangan, keluarga, kekayaan, dan hukum waris
- C. perorangan, kekeluargaan, adat, dan hukum dagang
- D. perorangan, kekayaan, dagang, dan hukum waris
- E. tentang orang, benda, perikatan serta tentang bukti, dan lewat waktu

UNAS-SMA-01-42

Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding, merupakan wewenang dari ...

- A. Pengadilan Negeri
- B. Pengadilan Tinggi
- C. Mahkamah Agung
- D. Pengadilan Militer
- E. Pengadilan Tata Usaha Negara

UNAS-SMA-01-43

Menurut UUD 1945, kekuasaan eksekutif dipegang oleh ...

- A. Presiden dan menteri-menterinya
- B. DPR bersama dengan pemerintah
- C. Pemerintah, DPR, dan Senat
- D. Menteri-menteri dan DPR
- E. DPR dan MPR

UNAS-SMA-01-44

Di negara Indonesia grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi hanya dapat diberikan oleh ...

- A. Hakim Tinggi
- B. Legislatif
- C. Yudikatif
- D. Kepala negara
- E. Mahkamah Agung

UNAS-SMA-01-45

Sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS 1949 adalah ...

- A. presidensial
- B. ministril
- C. parlementer
- D. ekstra parlementer
- E. koalisi

UNAS-SMA-01-46

Pada masa berlakunya UUDS 1950, bentuk negara Indonesia adalah ...

- A. uni riil
- B. mandat
- C. serikat
- D. kesatuan
- E. uni personil

UNAS-SMA-01-47

Salah satu alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah ...

- A. demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia
- B. keadaan politik membahayakan persatuan
- C. Presiden Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin
- D. anggota konstituante berasal dari berbagai partai
- E. perebutan kursi terjadi dalam Badan Konstituante.

UNAS-SMA-01-48

Demokrasi Paneasila adalah demokrasi yang didasarkan kepada kedaulatan rakyat. Adapun isi pokok yang *bukan* ajaran demokrasi Paneasila adalah ...

- A. berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila
- B. menghargai dan menjamin hak asasi manusia
- C. berdasarkan kelembagaan atau konstitusional
- D. pengambilan keputusan mengutamakan suara terbanyak
- E. bersendikan atas hukum sesuai penjelasan UUD 1945

UNAS-SMA-01-49

Kedudukan Pancasila dalam pembentukan partai politik berdasarkan UU No. 2 Tahun 1999 adalah ...

- A. satu-satunya asas dalam bernegara
- B. dasar negara dalam anggaran dasar partai
- C. lambang persatuan anggota partai
- D. tujuan organisasi sosial politik
- E. aspirasi politik anggota partai

UNAS-SMA-01-50

Salah satu asas pemilu di Indonesia yaitu asas rahasia, ini berarti bahwa setiap pemilih dijamin ...

- A. tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun termasuk para petugas
- B. kerahasiaannya dan dengan cara apapun orang lain dilarang mengetahuinya
- C. kerahasiaannya, siapapun dengan cara apapun tidak boleh mengetahuinya
- D. tidak diketahui siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya
- E. dapat disimpan rahasianya dan tidak diketahuinya dengan cara apapun

UNAS-SMA-01-51

Seseorang dinyatakan berstatus bipatride, apabila ...

- A. ia dilahirkan di negara yang menganut asas ius soli dan sekaligus ius sanguinis
- B. negaranya menganut ius sanguinis dan ia dilahirkan di negara yang ius sanguinis
- C. negaranya menganut asas ius sanguinis, tetapi ia dilahirkan di negara yang asas ius soli
- D. negaranya menganut asas ius soli dan dilahirkan di negara yang berasaskan ius soli juga
- E. negaranya menganut asas ius soli dan ia dilahirkan di negara yang asas ius sanguinis

UNAS-SMA-01-52

Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, apabila ...

- dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh MA
- bertempat tinggal di negeri asing 1 tahun berturut-turut
- dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup
- wanita asing yang menikah dengan pria keturunan Indonesia
- anak Indonesia yang diangkat menjadi anak warga negara asing

UNAS-SMA-01-53

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, bagi orang asing yang telah berusia 21 tahun dan menetap lebih dari 10 tahun melalui ...

- adopsi
- repudiasi
- perkawinan
- naturalisasi istimewa
- naturalisasi biasa

UNAS-SMA-01-54

Tujuan politik luar negeri Indonesia sesuai dengan cita-cita nasional (seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945) adalah ...

- memperjuangkan negara-negara yang menuntut hak kemerdekaannya
- hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara lain
- melaksanakan diplomasi internasional untuk menentang kolonialisasi
- membina kerjasama antarbangsa atas dasar saling pengertian
- menonjolkan tatanan dunia baru yang merdeka, tertib, dan damai

UNAS-SMA-01-55

Perhatikan data-data berikut ini!

- Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1
- Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2
- Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3
- Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
- Pasal 10 UUD 1945
- Pasal 11 UUD 1945
- Pasal 13 UUD 1945
- Pasal 16 UUD 1945

Berdasarkan data-data di atas, yang menjadi landasan struktural pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif sesuai dengan UUD 1945 adalah ...

- 1, 2, 5, dan 6
- 1, 3, 6, dan 8
- 1, 4, 6, dan 7
- 2, 4, 7, dan 8
- 3, 4, 7, dan 8

UNAS-SMA-01-56

No.	Perwakilan Diplomatik	No.	Perwakilan Konsuler
1.	Bertanggung jawab kepada pemerintah RI	1.	Bertanggung jawab kepada perwakilan diplomatik
2.	Tidak berwenang mewakili negara	2.	Berwenang mewakili negara
3.	Berada di bawah pemerintah RI	3.	Berada di bawah perwakilan diplomatik
4.	Berhubungan dengan pemerintah setempat	4.	Berhubungan dengan otoritas setempat

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan perwakilan diplomatik dengan konsuler ditunjukkan pada nomor ...

- 1 dan 2
- 1 dan 3
- 1 dan 4
- 2 dan 4
- 3 dan 4

UNAS-SMA-01-57

Perhatikan data berikut ini!

- Asas keturunan
- Asas kebangsaan
- Asas teritorial
- Asas kepentingan umum
- Asas tempat kelahiran

Berdasarkan data di atas, asas hukum internasional ditunjukkan dengan nomor ...

- 1, 2, dan 3
- 1, 3, dan 4
- 2, 3, dan 4
- 2, 3, dan 5
- 3, 4, dan 5

UNAS-SMA-01-58

Pernyataan berikut ini yang termasuk dalam kategori perjanjian multilateral adalah ...

- perjanjian ekstradisi
- konvensi hukum laut
- perjanjian dwi kewarganegaraan
- treaty contract*
- landas kontinen Indonesia

UNAS-SMA-01-59

Istilah lain dari perjanjian internasional adalah *modus vivendi*, yaitu bentuk perjanjian sementara antara dua negara atau lebih sampai berhasil diwujudkannya perjanjian yang memiliki persamaan, terinci, dan sistematis. *Modus vivendi* lahir karena adanya ...

- negara yang memperluas hubungan kerjasama
- suatu negara yang sedang bersengketa
- perjanjian yang baru dirintis
- peningkatan status diplomatik
- pemulihan hubungan diplomatik yang sedang putus

UNAS-SMA-01-60

Law making treaties merupakan suatu bentuk perjanjian yang sifatnya ...

- memaksa
- mengikat
- tertutup
- terbatas
- terbuka

UNAS-SMA-01-61

Penggolongan (klasifikasi) perjanjian internasional menurut fungsinya adalah ...

- A. perjanjian yang membentuk hukum dan politik
- B. perjanjian yang bersifat khusus dan batas wilayah
- C. perjanjian bersifat sederhana dan penting
- D. perjanjian yang membentuk hukum dan bersifat khusus
- E. perjanjian dari segi politis, ekonomis, dan hukum

UNAS-SMA-01-62

Berikut ini sebab-sebab perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral dapat berakhir, *kecuali* ...

- A. telah tercapainya tujuan perjanjian
- B. habis masa berlakunya
- C. perundingan (negotiation) tidak dihadiri kepala negara
- D. para peserta perjanjian setuju untuk mengakhiri perjanjian
- E. salah satu pihak peserta perjanjian punah.

UNAS-SMA-01-63

Dalam rangka menciptakan perdamaian dan kerja-sama di kawasan Asia Tenggara dibentuk organisasi

- A. OPEC
- B. ASEAN
- C. MEE
- D. NATO
- E. CGI

UNAS-SMA-01-64

Salah satu tujuan ASEAN adalah memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional lain yang ...

- A. sama tujuannya dengan tujuan ASEAN
- B. dapat membentuk program-program ASEAN
- C. dapat diajak dialog oleh ASEAN
- D. memberikan bantuan teknik pelatihan kepada ASEAN
- E. berdekatan dengan kawasan ASEAN

UNAS-SMA-01-65

Salah satu tekad dari umat manusia di dunia yang termuat pada mukadimah PBB adalah ...

- A. memberikan prioritas kepada negara-negara besar di bidang ekonomi
- B. menyelamatkan umat manusia dari bahaya perang
- C. menyatukan seluruh dunia dalam satu imperium
- D. perlunya rujuk antara Blok Timur dan Blok Barat
- E. diterapkannya secara konsisten hak veto

UNAS-SMA-01-66

Latar belakang berdirinya Gerakan Non Blok adalah ...

- A. berdirinya MEE dan NATO
- B. persaingan senjata dan perang dingin
- C. persaingan ekonomi dan perdagangan
- D. persaingan penerbangan luar angkasa
- E. kekuasaan besar Blok Barat dan Blok Timur

UNAS-SMA-01-67

Kebijakan mengenai perangkat pendukung organisasi MEE adalah sebagai berikut, *kecuali* ...

- A. Parlemen Eropa (European Parliament)
- B. Pertahanan Eropa (European Treaty)
- C. Sistem Moneter Eropa (European Moneter System)
- D. Unit Uang Eropa (European Currency Unit)
- E. Pasar Terpadu (Single Market)

UNAS-SMA-01-68

Contoh masalah ekonomi regional Asia Tenggara yang mendapat perhatian dialog negara-negara APEC adalah ...

- A. membentuk blok perdagangan dunia
- B. meningkatkan ekonomi negara anggota
- C. membentuk proteksi perdagangan
- D. mendirikan pasaran bersama Asia Pasifik
- E. membendung barung industri negara maju

UNAS-SMA-01-69

Contoh masalah politik di Asia Pasifik adalah ...

- A. terganggunya hubungan Indonesia - Australi karena masalah Tim-Tim
- B. pengaruh Hongkong masuk menjadi bagian wilayah RRC
- C. sengketa kepulauan Spratly di kawasan Laut Cina Selatan
- D. pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara baru
- E. pemeriksaan etnis tertentu di Indonesia

UNAS-SMA-01-70

Masalah regional yang berkembang menjadi masalah internasional pada awal tahun 1999 Eropa ...

- A. pembantaian etnis Bosnia oleh Serbia
- B. sengketa perbatasan antara Albania - Yunani
- C. pengusir etnis Albania di Kosovo oleh Serbia
- D. gerakan separatis Chechnya di Rusia
- E. gerakan separatis suku Kurdi di Yunani